UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah berdirinya PT. PLN (persero)

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai masuk di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 yaitu pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut :

1. Elektifikasi di wilayah kota Batavia, sekitar tahun 1893 merupakan *Stads Besriff* yang kelola oleh pemerintah setempat dengan nama *Electricteit Bedriff* Batavia.
2. Elektrifikasi di wilayah kota Medan, sekitar tahun 1903 merupakan *Stads Bedriff* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electricteit Bedriff* Medan.
3. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya, sekitar tahun 1907 merupakan *Stads Bedriff* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electristeit Bedriff* Surabaya.

Pada tahun berikutnya dikatakan bahwa kelistrikan di bangun di kota-kota lainnya antara lain ; di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak, sedangkan di Ambon dan Makassar untuk kepentingan militer

Perusahaan Listrik Zaman Hindia – Belanda

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan listrik), maka pendistribusian tenaga

listrik oleh pemerintah daerah di alihkan kepada perusahaan listrik swasta. Menurut pencatatatn pendirian perusahaan listrik Belanda yang ada di Indonesia terjadi sebagai berikut :

1.Perusahaan listrik NV Nigm yang kemudian merubah menjadi NVGEM

a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 28 tanggal 27 Juni 1913 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Batavia.

b. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 29 tanggal 1 November 1915 mengenai pemberiankonsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).

c. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 14 tanggal 12 Mei 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Tanggerang.

d. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 6 tanggal bulan November 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Cirebon.

e. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 20 tanggal 25 November 1925 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Kebayoran Lama.

f. Ijin beroperasi di keluarkan melalui SK. No. 12 tanggal 16 Juni 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Cirebon luar kota.

Pemberian ijin operasi pada NV untuk luar Jawa antara lain : dikeluarkan untuk wilayah kota Medan dan kemudian secara berturut-turut menyusul di wilayah Pelembang, Ujung Pandang, Tanjung Karang (Lampung), dan Manado. Keterangan mengenai ijin operasi kepada pendapat dan keterangan yang diperoleh, untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahin 1920 sedangkan untuk wilayah lainnya terjadi setelah tahun 1920, misalnya Medan, Lampung, Manado dan sebagainya.

2.Perusahaan Listrik NV ANEM

a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 6 tanggal 8 Februari 1914 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya, Semarang dan Yogyakarta.

b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 25 tanggal 9 Mei 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi beberapa wilayah di wilayah JawaTengah dan JawaTimur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRICA, EMR dan EMB.

c. Pemberian ijin beroperasi kepada NV ANEIM untuk elektricfikasi wilayah di luar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3.Perusahaan Listrik NV GEBEO

Perusahaan listrik ini merupakan usaha bersama pemerintah JawaBarat

dengan keputusan yang diberikan sebagai berikut :

a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya

b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 Maret 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Bogor dan sekitarnya.

c. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 24 bulan Desember 1930 ; No. 17 tanggal 21 Desember 1938; No. 21 tanggal 20 Mei 1940 dan No. 8 tanggal 18 Januari 1940 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan dan Kabupaten seluruh Propinsi Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Jakarta yang dikelola oleh NV NIGM

4.Perusahaan Listrik ELECTRA

a. Ijin beroperasi kepada perusahaan listrik ELEKTRA melalui SK. No. 37 tanggal 7 Juni 1915 untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung

b. Ijin beroperasi kepada perusahaan listrik ELEKTRA melalui SK. No. 31 tanggal 4 September 1922 dan SK. No. 33 tanggal 30 Maret 1927 untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung .

5.Perusahaan Listrik SEM

a. Ijin beroperasi dilekuarkan melalui Sk. No. 15 tanggal 21 desember 1925 untuk elektrifikasi wilayah kota Kesultanan Surakarta.

b. Ijin beroperasi dilekuarkan melalui Sk. No. 8 tanggal 8 Januari 1937 untuk elektrifikasi wilayah Kabupaten dan sekitarnya yang termasuk wilayah Surakarta..

6.Perusahaan Listrik OJEM

Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 28 tanggal 24 februari 1925; No. 8 tanggal 26 Desember 1925; No. 61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927 dan No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Panarukan dan beberapa dan sekitarnya

7.Perusahaan Listrik EMR

a. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 12 tanggal 25 Juni 1927 untuk elektrifikasi wilayah kota palembang.

b. Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 8, 9, dan 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk memperluas elektrifikasi wilayah Blora dan Bojonegoro.

8.Perusahaan Listrik EMB

Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 31 tanggal 27 September 1939 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Banyumas.

Perusahaan Listrik Zaman Jepang

Dalam Perang Dunia II semua perusahaan listrik dan wilayah Indonesia secara otomatis berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Perusahaan listrik yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasan AD Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Jigyoko sha di kantor pusat di Jakarta

2. Sabu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Barat

3. Chogu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Tengah

4. Tobu Jawa Denki sha di wilayah Jawa Timur

5. Cabang-cabang lainnya tetap seperti semula

Perusahaan Listrik setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan Fisik sampai tiba saatnya kedaulatan RI diserahkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda kepada Indonesia. tahun 1957 merupakan titik tolak awal dari pengelolaan dan pengawasan kelistrikan di seluruh wilayaah Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah RI, karena pada tahun tersebut dumulai adanya nasionalisme perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemrintah Indonesia yang dikukuhkan dengan peraturan No. 86 tahun 1958 Jo. PP No. 10 tahun 1959 tentang penetapan dibentuknya perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan PP. No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN Bandung diganti dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat, kecuali DKI Jaya dan Tangerang

Berdasarkan PP. No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan *recognisasi* menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah, PLN Eksploitasi XI diubah menjadi PULN Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya PP. No. 23 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk

menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juni 1994 sesuai dengan akta pendirian.

1.2 Visi, Misi, Motto, Filosofi, Tujuan dan Tatanilai Perusahaan PT. PLN

1.2.1 Visi :

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani

1.2.2 Misi :

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada keputusan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1.2.3 Motto :

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity for a Better Life*)

1.2.4 Filosofi :

Filosifi atau *Core Belieff* adalah landasan utama sebagai keyakinan untuk menunjukkan Misi dan Visi perusahaan.

Landasan filosofi PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah : "*Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelanggan dengan menjadikan SDM sebagai Sumber Daya penting perusahaan*"

1.2.5 Tujuan :

Tujuan PT. PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melakukan restrukturisasi ini adalah pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kedua kepuasan pelanggan meningkat, dapat di uraikan untuk jangka pendek , menengah, dan jangka panjang sebagai berikut :

- Jangka pendek (2000-2001)
  a. Mempercepat pemilihan kesehattan keuangan perusahaan.
  b. Membentuk Unit-Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) sebanyak 76 unit migrasi dari ranting/rayon yang ada, dan sebagai pilot proyek diterapkan 2 unit yaitu : UPP Bandung Timur dan UPP Padalarang.
  c. Membentuk Unit Pelayana Jaringan (UPJ) sebanyak 15 unit migrasi dari fungsi wire cabang (bagian distribusi dan bagian konstruksi).
  d. Pilot proyek dalam mendirikan UPP dan UPJ yaitu cabang Bandung, Majalaya, dan Cimahi (BMC), koordinasi oleh tim BMC.
  e. Menyiapkan 1 unit area Bandung Raya, Bale Endah, Cimahi, dan Sumedang.

f. Menyiapkan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menjadi UBD dengan organisasi yang baru, rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga serta persiapan SDM dan IT.

- Jangka menengah

a. Melaksanakan proses transformasi, organisasi melalui pembentukkan satu area yang membawahi UPJ-UPJ se Bandung Raya.

b. Menyiapkan UPP baru disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

c. Menyiapkan empat area lainnya, yaitu Bogor, Karawang/Bekasi., Cirebon dan Banten.

d. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme meniaga, dan sistem managemen yang terpadu antara UPP, UPJ, Area dan UBD Jawa Barat.

- Jangka panjang (2000-2003)

a. Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan yang siap menyongsong era kompetsi.

b. Melaksanakan proses transformasi orang melalui :

- Pembentukkan 5 area yang membawahi UPJ-UPJ
- Pembentukkan 15 Unit Pelayanan Jaringan
- Pembentukkan 84 Unit-unit Pelayanan Pelanggan

c. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga dan sisi managemen.

d. Menyiapkan pembentukkan Unit Non Core Business

e. Mentranformasikkan UBD Jawa Barat dan Banten menjadi anak perusahaan (diperkirakan setelah tahun 2005).

1.2.6 Tatanilai Perusahaan

PT. PLN (persero) mewujudkan bersama dengan selalu menunjang dan menerapkan nilai-nilai : Saling percaya (*mutual trust*)

Integritas (*integrity*)

Peduli (*care*)

Pembelajar *(learner*)

1.2.7 Lambang atau Gambar PT. PLN

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang-lambang perusahaan, lambang mempunyai arti yang penting bagi suatu perusahaan dan merupakan tanda pengenal yang tetap, bahwa lambang itupun mampu mencerminkan keberadaan perusahaan.

PT. PLN mempunyai suatu lambang yang berbentuk petir atau yang telah lama dipakai oleh PLN beserta satuan-satuannya. Berikut ini merupakan keterangan lambang PT. PLN

1.2.7.1 Arti Lambang Perusahaan, Bentuk dasar Gambar dan Warna Lambang

1. Gambar atau lambang PT. PLN tercantum dalam satu bidang gambar datar.
2. Berwarna kuning keemasan

3. Berbentuk segi empat dan berskala ukuran lebar : panjang : 3 : 4
4. Tanpa garis pinggir, apabila diperlukan pengambilan segi empat tersebut dapat digunakan garis pinggir sebagai batas
5. Tanpa tulisan listrik negara atau tulisan apapun didalamnya

Gambar atau lambang PT. PLN terdiri dari :

- ❖ Petir atau yang bentuknya tebal disebelah atas dan meruncing di sebelah bawah, berwarna merah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang
- ❖ Tiga buah gelombnag yang berbentuk sinusoda (2,5 periode) berwarna biru laut tersusun sejajar dalam arah mendatar terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan

1.2.7.2 Arti Lambang atau Gambar

Gambar diartikan sebagai berikut :

- Petir atau kilat melambangkan yang terkandung didalamnya
- Lambang dipergunakan dalam gambar, karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya lisrik, akulstik dan lain-lain), kegiatan PT. PLN mencakup konversi segala macam tenaga (energi) menjadi tenaga listrik.
- Tiga buah gelombang sejajar diartikan tiga sikap karyawan PT. PLN dalam melaksanakan tugas negara dengan bekerja keras, bekerja cepat dan bertindak tepat. Arti lainnya adalah pelayanan tugas PT. PLN harus serempak dalam tiga bidang: peningkataan, penyaluran, dan pendistribusian tenaga listrik.

Warna lambang PLN diartikan sebagai berikut :

- Warna kuning keemasan melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya kewajiban PLN
- Warna amerah darah melambangkann keberanian dan dinamika dalam melaksankan tuga suntuk mencapai sasaran pembangunan
- Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdiab pad atugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti dinyatakan dalam PP. No. 18 tahun 1927.

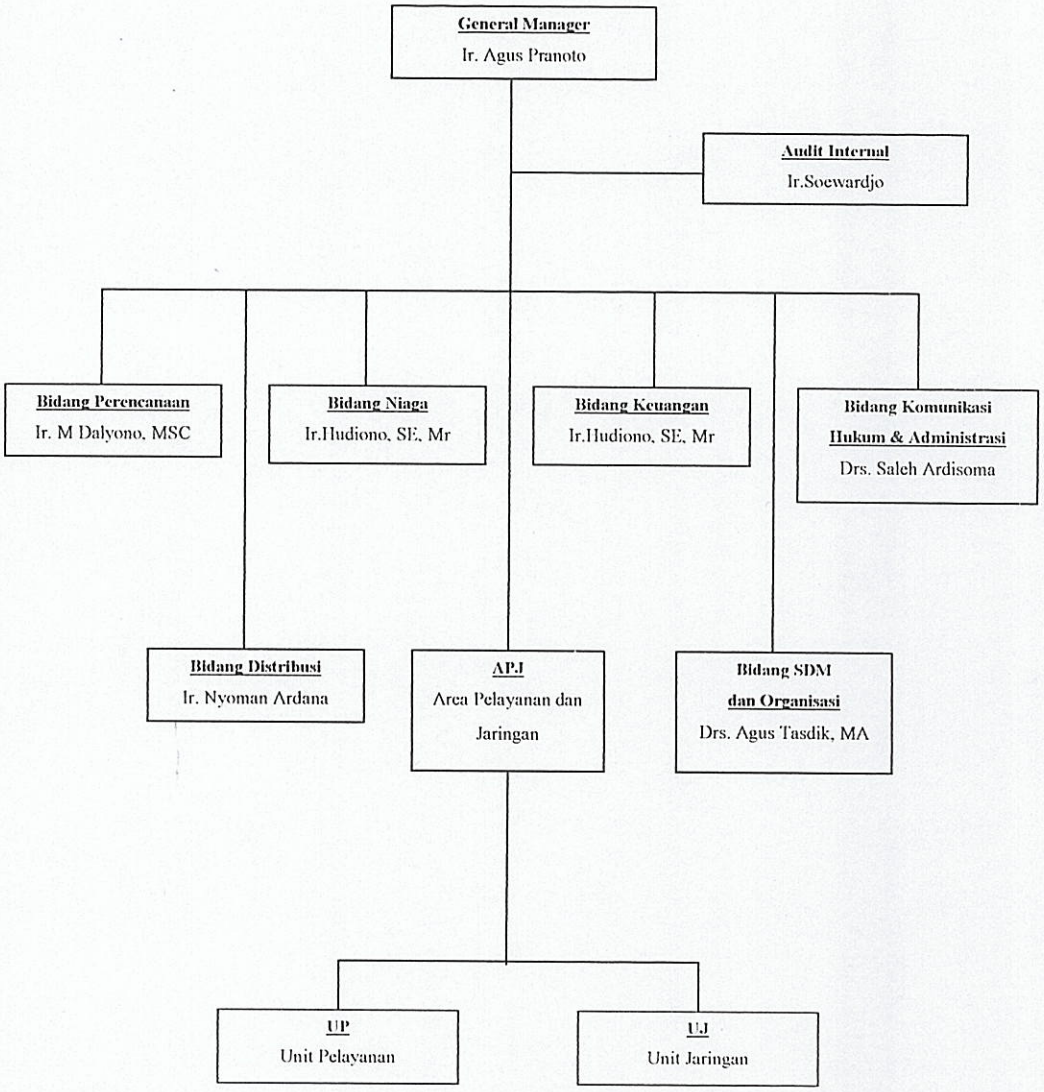
1.2.7.3 Penempatan tulisan yang menyatakan satuan PLN

Guna menyatakan satuan PLN pada lambang PLN maka bila dianggap perlu, dapat ditempatkan tulisan yang menyatakan satuan PLN yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pada papan nama PLN dicantumkan sebelah kanan lambang tersebut
- Pada benda seperti peralatan, kendaraan dan sebagainya disebelah atas lambang dicantumkan satuan induknya (PLN pusat, wilayah, proyek dan sebagainya) dibawah lambnag dicantumkan satuan eselonberikutnya (PLN lambang, sektor dll).

1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero)

UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN



1.4. Job Description

Dalam tataran praktisnya, masing-masing bagian memiliki *Job Description* yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan direksi No. 28/010/DIR/2001, Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha di bantu oleh Deputi Manajer Perecanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan dan jabatan kepakaran di bidang pengembangan Usaha serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya di tetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan korporat (*business plan*) serta rencana kerja dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
2. Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKI dan SKKO untuk penyusunan skala prioritasnya.
3. Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/analiansi usaha sesuai kaidah bisnis yang sehat.

Bidang Niaga

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Niaga dibantu oleh Deputi

Manajer Administrasi Niaga dan jabatan kepakara di bidang Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan, Regulasi Pelayanan dan P2TL, Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial, Sistem Pelayanan Pelanggan Umum, Pengembangan Pemasaran dan produk unggulan, Riset dan Intelegent Pasar, Negosiasi dan Transaksi Niaga, DSA dan Pentaripan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, Umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT/Cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli/produksi.
2. Kelompok kepakaran Pengembangan Sistem Pelayanan yang meliputi :
   2.1 Kepakaran Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan system dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
   2.2 Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring/evaluasi untuk rumusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi pelayanan.
   2.3 Kepakaran Sistim Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya system pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapat.

2.4 Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Umum bertanggung jawab atas tersedianya system pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.

2.5 Kepakaran Riset Kepuasan Pelanggan bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset/survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.

2.6 Kepakaran Peningkatan Kompetensi Pelayanan dan Niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi,umur piutang, pedapatan, penjualan dan susut).

3. Kelompok kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :

3.1 Kepakaran Pengembangan Pemasaran dan Produk Unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/produk unggulan untuk pencapaian target penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.2 Kepakaran Riset dan Intelegent Pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan intelegent pasar untuk mengetahui peta dan rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan/pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.3 Kepakaran Negosiasi dan Transaksi Niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfasilitasi transaksi niaga kontrak bisnis di unit pelaksana.

3.4 Kepakaran Tarif/Harga bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan kajian pentaripan/harga atas transaksi niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.

3.5 Kepakaran P2TL/Penertiban Niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan P2TL/Penertiban Niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga kerja).

3.6 Kepakaran Peningkatan Produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan penjualan dan susut tenaga listrik).

Bidang Distribusi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Distribusi dibantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Sistem, Deputi Manajer Operasi Distribusi, dan jabatan kepakaran di bidang Pengembangan Konstruksi, Konstruksi Listrik Pedesaan, Metering dan Proteksi, Telekomunikasi dan Scada serta jabatan operatif yang urai jabatan dan format tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistim distribusi yang andal dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban, serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).
2. Deputi Manajer Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan system pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan operasi yang aman, andal dan efisien.
3. Kelompok Kepakaran Engenering dan Logistik, meliputi :
   - 3.1 Kepakaran Matering dan Proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan sfesifikasi teknik peralatan metering dan proteksi.
   - 3.2 Kepakaran Scada dan telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan system operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 KV.
   - 3.3 Kepakaran Pemeriksa dan Penggunaan Tenaga Listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
   - 3.4 Kepakaran Peningkatan Kinerja Operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.
   - 3.5 Kepakaran Kwalitas Peralatan Listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.
   - 3.6 Kepakaran pengembangan Konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan sfesifikasi teknis untuk rencana pengembangan sistem distribusi.

3.7 Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung pembangunan konstruksi.

Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Keuangan dibantu oleh Deputi Manajer Pengendalian Anggaran, Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan, Deputi Manajer Akuntasi dan jabatan kepakaran di bidang Analisa dan Evaluasi Sistem Keuangan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan dana.
2. Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan system manajeman keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat serta mengelola keuangan yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.
3. Deputi Manajer Akuntasi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.
4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab atas merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia, Deputi Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia dan jabatan kepakaran di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolumen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan system pengelolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
2. Deputi Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
3. Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia.

Bidang Administrasi, Hukum dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Administrasi, Hukum dan Komunikasi dibantu oleh Deputi Manajer Sekretariat dan Umum, Deputi Manajer Hukum, Deputi Manajer Public Relations dan jabatan kepakaran di bidang perencanaan sarana kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sarana

Gedung/Bangunan dan sarana penunjang serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya di tetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Sekretariat dan Umum bertanggung jawab atas kelancaran operasional bidang kesekretariatan, rumah tangga perkantoran, serta pengelolaan fasilitas dan sarana kerja untuk kantor Unit Bisnis Distribusi.
2. Deputi Manajer Hukum bertanggung jawab atas tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pelanggan, mitra kerja, maupun pihak ketiga, serta mengelola produk hukum yang berupa ketentuan maupun yang berkaitan dengan aset tanah dan mewakili perusahaan dalam menghadapi persoalan baik di persidangan maupun di luar persidangan.
3. Deputi Manajer Public Relations bertanggung jawab atas terpeliharanya citra perusahaan dan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan publik eksternal dan internal dan terselenggaranya mass education dan customer education serta pembinaan dan koordinasi fungsi public relations diunit pelaksana dan terlaksananya program PUKK dengan baik.
4. Kepakaran Sarana dan Peralatan Kerja, bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan sarana kerja dan peralatan kerja secara tepat guna dan tepat biaya untuk mendukung kinerja pegawai dan perusahaan.
5. Kepakaran Tanah, Gedung dan Sarana Penunjang bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan bangunan/sarana gedung, tanah dan sarana penunjangnya yang memenuhi syarat secara tepat guna dan tepat biaya.

Auditor Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Auditor Internal dibantu oleh jabatan kepakaran seperti Auditor Teknik, Auditor Administrasi dan Keuangan, Auditor Mutu Layanan dan Auditor Muda serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Auditor Teknik bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang Teknik dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
2. Auditor Manajemen dan Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang Manajemen dan Keuangan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
3. Auditor Khusus bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah khusus dan mutu layanan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.

1.5 Sarana yang tersedia di PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat dan Banten

Sarana-sarana yang menunjang bagi mekanisme kerja diantaranya :

1. Perpustakaan
2. Komputer
3. Internet
4. Televisi
5. radio
6. Kamera
7. Video Shooting
8. Meja
9. Kursi
10. Lemari
11. Tape Recorder
12. Foto Copy
13. Gedung Serbaguna
14. Kantin, dll

1.6 Lokasi dan Waktu PKL

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di bagian Hukum dan Humas PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi jawa Barat dan Banten, Jalan Cikapundung Barat No.2 Bandung. Sedangkan pelaksanaan PKL dilakukan terhitung mulai tanggal 23 juli sampai dengan 23 Agustus 2003, di mulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB